

**HERMENEUTIKA BHABINKAMTIBMAS PERSPEKTIF
IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT
BERBASIS KEMANDIRIAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH DESA TANGKIL KECAMATAN SRAGEN
KABUPATEN SRAGEN**

SUMARJI

NPM : 16111005

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what the basics of Bhabinkamtibmas consider to build community policing based on village independence to realize security and order in the Tangkil Village of Sragen Subdistrict Sragen, as well as the obstacles that Bhabinkamtibmas have in building community policing to realize security and order in Tangkil Village in Sragen Subdistrict Sragen Regency. The background of the research is that the research was conducted in Tangkil Village in Sragen Subdistrict Sragen Regency. The research method consists of hermenetic research approach that is the data collection technique used by the method of field research through interview and literature study research, then from all the collected data done by qualitative analysis.

Research findings show that Bhabinkamtibmas's role in building community policing is through working professionally by implementing community development, early detection and mediation / negotiation aimed at creating conducive conditions in rural areas. The obstacles experienced by Bhabinkamtibmas in maintaining and implementing security and order in the Tangkil Village area Sragen Subdistrict Sragen Regency: Internal Barriers: Binmas Unit / Bhabinkamtibmas Unit as the mainstay of the main government is still a duplicate of the work, Limitation of the ability of Bhabikamtibmas especially in the provision of construction material as well as communication techniques with the community, There is still a Bhabinkamtibmas assignment that is more than one hosted village. The absence of a continuous socialization of the other functions of the Police (Intel, reserse, traffic, sabhara) and Binmas's function regarding Bhabinkamtibmas and the empowerment of the Police. External Obstacles: Covering the presence of an Independent Police and Community Partnership Offices (BKPM) in both villages and subdistricts, the main activity of the policymakers of Bhabinkamtibmas to establish partnerships with the community has not been properly facilitated. The Polri and Community

Partnership Forum (FKPM) in villages / villages as a vehicle for communication between the National Police and the community concerned with issues of social and social issues and seeking solutions on the basis of a collective agreement is less effective, this is due to the role Police in relation to Bhabinkamtibmas Officers do not play the maximum role because of the complexity and duplication of work. How to overcome the problem of Obtimalization of Bhabinkamtibmas in the construction area can be done through Human Resource Improvement through education, provision of Police and Community Partnership Center (BKPM), Placement of one village / village Bhabinkamtibmas personnel, Placement of Bhabinkamtibmas officers domiciled in their respective residential areas and professionalism with not duplicate work.

Key words : Bhabinkamtibmas, community policing

PENDAHULUAN

Paul Ricoeur adalah salah satu nama beken dalam kancah filsafat, berbagai kajian tentang Ricoeur diselenggarakan di berbagai tempat, baik secara personal insidentil oleh para pemikir dan penulis maupun secara kolektif sistematis oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi. Dalam study hermeneutika, Ricoeur telah menyumbangkan gagasan-gagasan (ideas) baru tapi bahkan wawasan (insight) baru. Ricoeur menempatkan hermeneutika sebagai kajian terhadap ekspresi-ekspresi kehidupan yang terbakukan dalam bahasa. Pemikiran hermeneutika Paul Ricouer yaitu apa yang disebut sebagai jalan panjang hermeneutika. Menurut Ricoeur tugas utama hermeneutika adalah untuk memahami teks dimana sebuah teks itu memiliki kemandirian serta totalitas. Tujuan Ricoeur dalam teori ini adalah membangun sebuah epistemologi baru bagi ilmu-ilmu sosial maupun humaniora. Karena berdasarkan pendalaman pada hermeneutik sebagai kajian terhadap teks, Ricoeur menganggap bahwa objek dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora memiliki karakter sebagai teks dan dengan demikian metodologi kajiannya interpretative. Nasib hermeneutika tidak tergantung pada teori tertentu

yang membahas tentang makna dimana hermeneutika memperhatikan level-level persoalan yang berbeda mengenai pemahaman dan interpretasi terhadap satuan yang lebih besar seperti teks dan konteksnya.

Perkembangan filsafat bahasa ke arah hermeneutika ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan metode penelitian kualitatif terutama dengan metode hermeneutika, yang banyak dikembangkan dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu sosial dan humaniora. Dalam kajian hermeneutika pemolisian masyarakat/polmas maupun bhabinkamtibmas, pemahaman dalam memaknai bahasa polmas maupun bhabinkamtibmas mutlak diperlukan sehingga manifestasi totalitas pemikiran mengenai bahasa polmas maupun bhabinkamtibmas tersebut dapat dimengerti, karena hampir semua hal terungkap melalui bahasa.

Berdasarkan dari kajian terhadap hermeneutika tersebut, konsep hermeneutik sangat baik serta menarik untuk memahami teks secara mandiri serta totalitas dalam menggambarkan konteks dari teks maupun bahasa itu sendiri terhadap kajian Polmas terutama Bhabinkamtibmas Polri yang dimana dianggap dan mampu sebagai ujung tombak polri dalam harkamtibmas ditingkat wilayah Desa maupun Kelurahan.

Bhabinkamtibmas mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi yang bertujuan agar tercipta kondisi yang kondusif di wilayah desa atau kelurahan. Disamping tugas pokok Bhabinkamtibmas juga mempunyai fungsi yaitu melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat, membimbing dan menyuluh di bidang

hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menyebarluaskan informasi tentang bijak polri kepada masyarakat, mendorong pelaksanaan poskamling, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak lainnya, melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melihat hal tersebut tentunya untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, hal itu tentunya dibutuhkan peran dari Pengemban polmas yaitu seluruh anggota polri serta Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) sebagai salah satu pioner yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak polri dikewilayahan dalam penerapan strategi community policing/polmas tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Bhabinkamtibmas membangun pemolisian masyarakat berbasis kemandirian di Desa Tangkil Kabupaten Sragen ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami dalam membangun pemolisian masyarakat berbasis kemandirian desa dan bagaimana cara mengatasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Tangkil Kabupaten Sragen ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dan mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam membangun pemolisian masyarakat berbasis kemandirian desa di Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.
2. Mengetahui hambatan yang dialami dalam pemolisian masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penulisan Tesis ini meliputi :

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Merupakan Teknik Pengumpulan data yang dilakukan di tempat yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dengan penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara

merupakan alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan .

Dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan wawancara dengan warga atau sumber penelitian yang bias untuk bahan penulisan tesis ini.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur-literatur, diktat-diktat, dan juga bahan-bahan dokumentasi serta peraturan perundang-undangan atau keputusan serta instruksi-instruksi yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dipergunakan dalam menyusun penulisan tesis ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap :

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
- 3) Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Undang-undang No. 2 Tahun 2002
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-dasar Pertimbangan Hermeneutika Bhabinkamtibmas Perspektif

Implementasi Pemolisian Masyarakat Berbasis Kemandirian Desa

Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Desa

Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen :

1. Surat Kapolda Jateng: B/3156/IV/2011/Ro Dit Binmas tanggal 05 April 2011 perihal tata cara pelaporan kegiatan Polmas.
2. Keputusan Kapolres Sragen Nomor : 02 / I / 2015 Tgl. 16 Januari 2015. Tentang Pengangkatan Anggota Bhabinkamtibmas.
3. Program Kerja Satuan Binmas Sragen tahun 2017.

B. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Petugas Polmas

Bhabinkamtibmas meliputi :

Hal-hal yang berkaitan dari intern yaitu:

- 1) Anggota Unit Binmas/Bhabinkamtibmas selaku pemangku polmas utama masih rangkap pekerjaan sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan kurang maksimal.
- 2) Keterbatasan kemampuan Bhabinkamtibmas terutama dalam hal bekal materi pembinaan maupun menyangkut tehnik berkomunikasi dengan masyarakat.
- 3) Petugas Bhabinkamtibmas masih terkendala jarak, dimana jarak antara Mako Polsek dengan daerah binaan cukup jauh sekitar 15 kilometer atas bahkan lebih seperti yang dialami Brigadir Rustamiaji

Indra Nugraha Bhabinkamtibmas Desa Kenteng Nogosari Boyolali dan Brigadir Dwi Indriantoro Bhabinkamtibmas Desa Patukrejo Bonorowo Kebumen .

- 4) Masih adanya penugasan Bhabinkamtibmas yang lebih dari satu desa binaan seperti yang dialami oleh Brigadir Rustamiaji, selain bertugas di desa Kenteng juga mengemban/mengampu tugas di desa Patronayan sebagai desa pantauan, sehingga kurang begitu maksimal dalam pelaksanaan tugasnya dikarenakan wilayah pengawasan kerja binaan terlalu luas.
- 5) Belum adanya sosialisasi yang berkesinambungan dari satuan fungsi Polri yang lain selain fungsi Binmas (Intel, reserse, lalu lintas, sabhara) maupun anggota staff pengemban polgasum/polisi tugas umum, tentang tugas Bhabinkamtibmas dan pemberdayaan masyarakat melalui Polmas sehingga belum dapat dirasakan kehadiran petugas Bhabinkamtibmas di masyarakat, sehingga menyebabkan belum terwujudnya kerja sama/kemitraan antara polisi dan masyarakat yang baik.

Adapun hal yang berkaitan dari ekstern yaitu:

- 1) Infrastruktur jalan yang kurang baik/belum diperbaiki serta belum maksimalnya penerimaan sinyal seluler hp dikarenakan wilayah binaan yang jauh dari perkotaan dan cenderung terpencil sehingga komunikasi dengan berbagai stakeholder/supra desa tidak dapat dilakukan lewat hp seluler melainkan untuk efektifitas komunikasi

hanya dapat dilakukan melalui tatapmuka/komunikasi langsung, seperti di desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan desa Pantukrejo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

- 2) Belum adanya Kantor Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) yang mandiri baik di desa maupun kelurahan, sehingga kegiatan pengemban polmas utamanya Bhabinkamtibmas untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat belum terfasilitasi dengan baik.
- 3) Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) yang ada di desa/kelurahan sebagai wahana menjalin komunikasi antara Polri dan masyarakat yang membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial serta mencari penyelesaian atas dasar kesepakatan bersama seakan kurang begitu berjalan efektif, hal ini lebih disebabkan karena peran Polri dalam kaitannya Petugas Bhabinkamtibmas tidak berperan maksimal dikarenakan kompleksitas dan rangkap pekerjaan.
- 4) Dalam hal pengawasan dana desa, masih terjadi kesamaan baik yang dialami petugas Bhabinkamtibmas desa tangkil sragen, desa kenteng boyolali dan desa pantukrejo kebumen, yaitu masih terjadinya interpretasi kehati-hatian dari pemerintah desa baik perangkat dan kepala desa dalam menyampaikan informasi-informasi data yang utamanya berkaitan dengan aspek pendanaan dalam pembangunan di desa kepada Bhabinkamtibmas, sehingga terjadi ambivalensi yang

berimplikasi pada petugas Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa didalam implemetasi Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kapolri di wilayah dalam hal ini di desa.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Hermeneutika Bhabinkamtibmas Perspektif Implementasi Pemolisian Masyarakat Berbasis Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban di Wilayah Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dapat ditarik kesimpulan yaitu :

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahuinya peran Bhabinkamtibmas dalam membangun pemolisian masyarakat yaitu melalui bekerja secara profesional dengan melaksanakan/implementasi pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi yang bertujuan agar tercipta kondisi yang kondusif di wilayah desa atau kelurahan. Hambatan-hambatan yang dialami Bhabinkamtibmas dalam menjaga serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yaitu: Hambatan dari dalam: yaitu Anggota Unit Binmas/Bhabinkamtibmas selaku pemangku polmas utama masih rangkap pekerjaan, Keterbatasan kemampuan Bhabikamtibmas terutama dalam hal bekal materi pembinaan maupun menyangkut tehnik berkomunikasi dengan masyarakat, Masih adanya penugasan Bhabinkamtibmas yang lebih dari satu desa binaan, Belum adanya sosialisasi yang berkesinambungan dari fungsi Polri yang lain (Intel, reserse, lalu lintas, sabhara)

selain fungsi Binmas mengenai Bhabinkamtibmas dan pemberdayaan Polmas. Hambatan dari luar : Meliputi Belum adanya Kantor Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) yang mandiri baik di desa maupun kelurahan sehingga kegiatan pengemban polmas utamanya Bhabinkamtibmas untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat belum terfasilitasi dengan baik. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) yang ada di desa/kelurahan sebagai wahana menjalin komunikasi antara Polri dan masyarakat yang membahas masalah kamtibmas dan masalah-masalah sosial serta mencari penyelesaian atas dasar kesepakatan bersama seakan kurang begitu berjalan efektif, hal ini lebih disebabkan karena peran Polri dalam kaitannya Petugas Bhabinkamtibmas tidak berperan maksimal dikarenakan kompleksitas dan rangkap pekerjaan.

SARAN-SARAN

Setelah penulis mempelajari dan meneliti mengenai Hermeneutika Bhabinkamtibmas Perpektif Implementasi Pemolisian Masyarakat Berbasis Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Desa Tangkil Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen maupun di wilayah lain yaitu Desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan Desa Pantukrejo Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan dapat dilakukan melalui Peningkatan SDM melalui pendidikan, penyediaan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM), Penempatan personil satu desa/kelurahan satu Bhabinkamtibmas, Penempatan petugas Bhabinkamtibmas yang

berdomisili di wilayah tempat tinggal masing-masing serta profesionalitas dengan tidak rangkap pekerjaan.

2. Keberhasilan dalam pelaksanaan polmas di masyarakat dapat terwujud, dibutuhkan adanya sinergitas antara pemangku polmas dalam hal ini anggota polri, bhabinkamtibmas dengan masyarakat sebagai obyek kamtibmas didukung dari partisipasi instansi pemerintahan yang lain.
3. Permasalahan yang terjadi di masyarakat hendaknya dapat ditampung terlebih dahulu dilingkup FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang ada di kantor desa atau kelurahan dengan tujuan utama efektifitas pemangku polmas yang ada di wilayah dapat berjalan dengan efektif sehingga kundusifitas kamtibmas dalam wilayah binaan Bhabinkamtibmas maupun unsur polmas yang lainnya dapat terwujud.
4. Dalam hal pengawasan dana desa, yaitu implemetasi Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman antara Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kapolri di kewilayahan dalam hal ini di desa, perlu adanya keterbukaan serta menjunjung tinggi nilai transparansi serta profesionalitas, diharapkan pemerintah desa maupun perangkat agar transparan dalam menyampaikan informasi-informasi data yang utamanya berkaitan dengan aspek pendanaan dalam pembangunan di desa sehingga Bhabinkamtibmas polri maupun masyarakat dapat menjalankan fungsinya secara baik dan maksimal guna pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2001. “ Sistem Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi”, *Majalah Perencanaan Pembangunan*, edisi 24 th 2001.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bantarto Bandoro (ed). 1996. *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Jakarta: CSIS.
- ntarto, R., 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya.*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bismar Siregar. 1983. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung : Alumni.
- Buwono X, Hamengku Sultan. 2007. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: Gramedia.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Darmono, Bambang. dkk, 2010, KEAMANAN NASIONAL: *Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. sekjen Wantannas.
- Ditjen Otonomi Daerah, 2006, “Tata Hubungan Desa dan Supradesa,” makalah masukan mengenai desa di masa depan, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Jakarta, 4 Juli 2006.
- Edy, Lukman, 28 Februari 2008, Penguatan Kelembagaan Desa, www.reformasihukum.org.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment, The Politics of Alternative Development*, USA: Blackwell Publishers.
- Gayatri, Irine Hiraswasti, 2007. “Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?”, makalah diskusi Perkumpulan INISIATIF, Bandung, 16 April 2007.
- Giddens, Anthony. 2010, *Teori Strukturasi ; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin, TB. 2013. *Arsitektur Keamanan Nasional: Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi*. Jakarta: RM.

- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermenutik*, Jakarta : Paramadina.
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme Dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Lemhanas. 1980. *Bunga Rampai Ketahanan Nasional: Konsepsi dan Teori*, Jakarta: Ripres Utama.
- Lopa, Baharuddin, M. Ryaas Rasyid, Piping Syahbudin. 1987. *Implementasi Wawasan Nusantara*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana, Slamet, 2008. *Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Samego, Indria. 2001, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, Jakarta: The Habibie Center.
- Segers, Rien T. 2000, *Evaluasi Teks Sastra*, Penerjemah: Sumino A. Suyuti, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Sumaryono, E.1993.*Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.